

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam penunjang operasional kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki fasilitas perkantoran Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dan Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah (SAMSAT) yang melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pungutan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diseluruh Kabupaten /Kota antar lain : UPTD PPRD Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kutim, Kubar, Paser Utara, Paser, dan Berau.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan Kembali dengan Kepmandagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan pertanggungjelasn penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2022 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
- Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
- Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir;
- Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan - peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/10552/2821-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Awal Tahun 2023 serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3. *Sistematika Penulisan*

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5. Pendapatan LO
 - 5.1.6. Beban LO
 - 5.1.7. Aset
 - 5.1.8. Kewajiban
 - 5.1.9. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Bab VI Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. *Ekonomi Makro*

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2022 melanjutkan tren perbaikan dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh capaian kinerja positif pada hampir seluruh lapangan usaha. Dari sisi produksi, peningkatan kinerja ekonomi Kaltim utamanya bersumber dari peningkatan kinerja hampir seluruh LU, khususnya LU pertambangan dan LU industri pengolahan. Pada sisi pengeluaran, peningkatan kinerja utamanya disebabkan oleh kinerja ekspor dan konsumsi masyarakat di tengah perlambatan Investasi dan terkontraksinya belanja pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kaltim pada triwulan II 2022 mengindikasikan adanya peningkatan baik realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah. Di tingkat pemerintah provinsi, peningkatan kinerja keuangan pada triwulan II 2022 utamanya disebabkan oleh tingginya realisasi pendapatan. Sejalan tingkat provinsi, realisasi pendapatan dan belanja APBD pada 8 Kabupaten/Kota di Kaltim pada triwulan II 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan APBD, realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Prospek Perekonomian Kaltim pada tahun 2022 akan melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan berada pada rentang 2,85% - 3,65% (yoy) lebih tinggi dari realisasi tahun 2021 yang sebesar 2,48% (yoy). Inflasi tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh tingkat konsumsi masyarakat yang kembali pulih di tengah terdisrupsi pasokan pangan nasional baik dikarenakan isu domestik maupun global.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan anggaran belanja daerah sebesar Rp241.245.028.161,00 yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022

Kode	Uraian	Anggaran
5	Belanja Daerah	241.245.028.161,00
5.1	Belanja Operasi	223.574.712.821,00
5.2	Belanja Modal	17.670.315.340,00

Anggaran Perubahan Belanja langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp241.245.028.161,00 sebagaimana rincian diatas, mengalami peningkatan sebesar Rp191.049.157.065,55 atau sebesar 79,19% bila dibandingkan anggaran tahun 2021 yaitu Rp182.064.333.827,19 Peningkatan anggaran tersebut dialokasikan pada semua program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2022.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumber daya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamanahkan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp7.371.829.856.245,36 nilai ini melampaui dari target sebesar Rp5.612.000.000.000,00 atau sebesar 131,36%. Dan bila dibandingkan dengan tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan Rp2.560.081.596.704,39 atau sebesar 53,20% dari realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp4.811.748.259.540,97 Realisasi belanja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp191.049.157.065,55 nilai ini lebih kecil dari anggaran sebesar Rp241.245.028.161,00 atau sebesar 79,19%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp8.984.823.238,36 atau sebesar 4,93% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp182.064.333.827,19.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
5-02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	191.007.470.848,00		
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	670.181.900,00	Jumlah Dokumen dan perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	27 Dokumen
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.488.216.903,00	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen
	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	372.040.000,00	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselenggarakan tepat waktu	12 Laporan
	04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	1.750.815.000,00	Meningkatnya Pendanaan pembangunan Daerah	20 Dokumen
	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.641.408.000,00	Presentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesional ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi	72%
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.026.212.491,00	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291 Buah
	07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	17.845.092.630,00	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	103 Unit
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.797.833.924,00	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Jenis Jasa
	09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2.415.670.000,00	Jumlah sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	359 Unit
5-02.02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.237.200.000,00		
	03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	274.600.000,00	Jumlah dokumen penerimaan bukan pajak daerah	4 Dokumen
	05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	962.600.000,00	Meningkatkan Dokumen Penerimaan Bukan Pajak Daerah	8,28 %
5-02.04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.792.213.000,00		
	01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	10.792.213.000,00	Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah	126,4 Persen

Dalam pencapaian target-target tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan.

Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2022 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. *Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan*

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (01)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp191.007.470.848,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp146.777.140.066,00 atau 76,84%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.01)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp670.181.900,00 dan terealisasi sebesar Rp470.125.504,00 atau 70,14%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (01.02)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp150.488.216.903,00 dan terealisasi sebesar Rp116.915.278.172,00 atau 77,69%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (01.03)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp372.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp335.782.288,00 atau 90,25%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- *Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (01.04)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.750.815.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.298.822.550,00 atau 74,18%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.
- *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (01.05)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.641.408.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.152.754.089,00 atau 70,22%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.
- *Kegiatan Adminsitration Umum Perangkat Daerah (01.06)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.026.212.491,00 dan terealisasi sebesar Rp2.861.181.115,00 atau 40,72%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.
- *Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.07)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp17.845.092.630,00 dan terealisasi sebesar Rp14.921.709.502,00 atau 83,61%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.
- *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.08)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp8.797.833.924,00 dan terealisasi sebesar Rp6.720.141.515,00 atau 76,38%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini
- *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.09)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.415.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.101.345.331,00 atau 86,98%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah (02)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp1.237.200.000,00 pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp879.861.347,00 atau 71,11%.

- *Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (02.03)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp274.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp241.966.332,00 atau 88,11%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- *Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (02.05)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp962.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp637.895.015,00 atau 66,26%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (04)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp10.792.213.000,00 pada Program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp8.768.789.802,00 atau 81,25%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- *Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah (04.01)*

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.792.213.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.768.789.802,00 atau 81,25%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3.2. *Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan*

Pencapaian target yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2022 tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti, realisasi pendapatan daerah kaltim tahun 2022 lampau target hal ini disebabkan keadaan dalam masa pandemi Covid19 mulai berangsur normal sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan walaupun masih tetap waspada dengan mematuhi protokol kesehatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. *Entitas Akuntansi*

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2. *Basis Akuntansi*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. *Basis Pengukuran*

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perubahan atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1. Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Financial Management Information System (FMIS) Aplikasi Financial Management Informasi System Sistem.

Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2. Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1. Pendapatan - LRA

- Definisi

Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan

tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

4.4.2.2. *Belanja*

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4.4.2.3. *Pendapatan - LO*

- Definisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4. *Beban*

- Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- Penyajian

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu :

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5. Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu:

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut :

- Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominalnya.
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).

- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang).
 - Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang.
 - Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya.
 - Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
 - Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi :
 - Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu :
 - ✓ Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas
 - ✓ Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas
 - Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
 - Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.
- Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek Lainnya
Piutang Pendapatan
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Uang Muka
Panjar Kegiatan
Piutang Kelebihan Pungut Pph
Penyisihan Piutang
Penyisihan Piutang Pendapatan
Penyisihan Piutang Lainnya
Beban Dibayar Dimuka
Beban Pegawai Dibayar Dimuka
Beban Barang Dibayar Dimuka
Beban Jasa Dibayar Dimuka
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainn

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Goodwill

Lisensi dan frenchise

Hak Cipta
Paten
Aset Tidak Berwujud Lainnya
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6. *Kewajiban*

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut :

▪ Kewajiban

▪ Kewajiban Jangka Pendek

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

- Kewajiban Jangka Panjang
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7. *Ekuitas*

- Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- Pengakuan

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- Penyajian

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V

RINCIAN DAN PENJELASAN POS - POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perubahan atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2022.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp5.612.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.371.829.856.245,36 atau sebesar 131,36%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah menargetkan rincian obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok, Pendapatan Retribusi Daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan, Lain-lain PAD Yang Sah berupa Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Denda Retribusi, dan Pendapatan dari Pengembalian serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		(%)	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5)x100
PENDAPATAN – LRA	5.612.000.000.000,00	7.371.829.856.245,36	131,36	4.811.748.259.540,97	53,20
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</u>	5.612.000.000.000,00	7.357.700.776.245,36	131,11	4.800.841.204.540,97	53,26
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.612.000.000.000,00	7.326.160.984.249,64	130,54	4.774.890.855.288,57	53,43
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	0,00	286.800.000,00	0,00	271.712.600,00	5,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	0,00	31.252.992.004,72	0,00	25.678.636.652,40	21,70
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA</u>	0,00	14.129.080.000,00	0,00	10.907.055.000,00	29,54
Pendapatan Hibah – LRA	0,00	14.129.080.000,00	0,00	10.907.055.000,00	29,54

Realisasi pendapatan tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.560.081.596.704,39 atau 53,20%. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.2. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penarikan pajak sebagai salah satu pendapatan daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.326.160.984.240,64 atau sebesar 130,54% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.551.270.128.952,07 atau sebesar 53,43% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.774.890.855.288,57. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)x100	5	6=((3-5)/5)x100
Pajak Kendaraan Bermotor	1.150.000.000.000,00	1.271.895.140.197,00	110,60	1.007.717.655.435,00	26,22
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.050.000.000.000,00	1.240.322.341.882,00	118,13	905.584.548.068,00	36,96
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.400.000.000.000,00	4.804.399.816.223,43	141,31	2.618.624.833.478,17	83,47
Pajak Air Permukaan	12.000.000.000,00	9.543.685.938,21	79,53	10.897.465.989,40	-12,42
Jumlah	5.612.000.000.000,00	7.623.160.984.240,64	130,54	4.542.824.502.970,57	61,27

5.1.1.2.3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp1.150.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.271.895.140.197,00 atau 110,60%. Bila realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.007.717.655.435,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp264.177.484.762,00 atau sebesar 26,22%. Hal ini disebabkan oleh :

- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai dampak dari kemudahan layanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti mempermudah pembayaran pajak oleh wajib pajak secara Elektronik (E-Samsat) melalui ATM Bank Pembangunan Daerah Kaltitara, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero), PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia, Indomaret, Smartphone, MPosPay, Loker Pos, Delivery Pos, Loker PT. Pegadaian, Gojek, tokopedia, dan Seluruh Gerai Indomaret.

- Adanya relaksasi pajak dengan menerbitkan beberapa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur sebagai berikut :

No.	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku	Tentang	Rangkuman Isi SK
1.	973/K.636/2022	30 September 2022	4 Oktober s/d 30 Desember 2022	Pembebasan Pokok, Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Umum Orang Jenis Angkutan Kota Dan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi (Ojek Online)	Pembebasan Pokok PKB untuk kendaraan angkutan umum orang dalam kota/desa dan sepeda motor (ojek online)
2.	973/K.78/2022	14 Februari 2022	15 Februari 2022 s/d 15 Agustus 2022	Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya	1. Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya. 2. Keringanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 50% (lima puluh persen) dan diberikan terhadap semua jenis kendaraan bermotor.
3.	973/K.533/2022	11 Agustus 2022	16 Agustus 2022 s/d 31 Oktober 2022	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Ke Dua Dan Seterusnya	1. Membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya. 2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, sebagaimana dalam diktum KESATU diberikan terhadap semua jenis kendaraan bermotor yang teregistrasi di Samsat Kalimantan Timur.
4.	973/K.534/2022	11 Agustus 2022	16 Agustus s/d 31 Oktober 2022	Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pajak Progresif serta Diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pembebasan sanksi administrasi 2. Pembebasan pajak progresif 3. Diskon 2% pembayaran PKB sebelum jatuh tempo 30 hari 4. Diskon 4% pembayaran PKB jatuh tempo 31 s/d 60 hari 5. Diskon pokok PKB untuk tunggakan pajak di atas 4 tahun, hanya dikenakan pokok pajak 3 tahun

No.	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku	Tentang	Rangkuman Isi SK
5.	660.2/K.200/2022	6 April 2022	7 April s/d 23 April 2022	Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Pasar Ramadhan Gedung Olahraga Segiri Samarinda	Membebaskan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Pasar Ramadhan Gedung Olahraga Segiri Samarinda dengan masa pajak jatuh tempo satu tahun atau lebih
6.	973/K.198/2022	5 April 2022	23 Maret s/d 27 Maret 2022	Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada loket pelayanan Explore Borneo Kaltim 2022 di Big Mall Samarinda
7	973/K.77/2022	14 Februari 2022	15 Februari s/d 15 Agustus 2022	Pembebasan Tarif Progressif atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya	Pembebasan Tarif Progressif atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dst dikenakan tarif 1,75%
8	973/K.732/2022	31 Oktober 2022	1 Nopember s/d 30 Desember 2022	Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pajak Progressif serta Diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan Pajak Progressif 2. Diskon 2% untuk PKB jatuh tempo sebelum 30 hari 3. Diskon 4% untuk PKB jatuh tempo 31 – 60 hari 4. Diskon PKB yang menunggak pajak 4 tahun lebih hanya dikenakan pajak 3 tahun
9	973/K.731/2022	31 Oktober 2022	1 Nopember 2022 s/d 30 Desember 2022	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya	1. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Atas 2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya sebagaimana dalam diktum KESATU diberikan terhadap semua jenis kendaraan bermotor yang teregistrasi di Samsat.

- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan Sistem online yang terintegrasi di seluruh wilayah Kalimantan Timur, dimana pembayaran bisa dilakukan pada seluruh wilayah Kalimantan Timur.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur intensif dalam melakukan penagihan dan inventarisasi (pendataan) terhadap objek pajak kendaraan bermotor umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- Meningkatkan pelayanan publik kepada wajib pajak dengan membangun sarana dan prasarana yang baru dan baik seperti pelayanan Samsat Pelita yang menjangkau seluruh pelosok Wilayah Kalimantan Timur untuk

melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dan Lima Tahunan.

- Adanya pengembangan Sistem Informasi/Inovasi atas Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator) kepada masyarakat sehingga lebih memudahkan masyarakat (wajib pajak) mengetahui jumlah pajak terutang dan melakukan pembayaran melalui Aplikasi Uang Elektronik dan saat ini pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bisa melalui aplikasi Link Aja, Tokopedia, Pos, Indomaret, Paykaltimara, Gojek, Samqris (Samsat Ber-Qris) dan aplikasi DG Kaltimara yang bekerja sama dengan E-Samsat dalam genggaman Bhabinkamtibmas.

4.1.1.2.4. *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)*

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2022 telah melebihi target dari yang telah ditetapkan (118,13%). Bila Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2022 dari target sebesar Rp1.050.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.240.322.341.882,00 di bandingkan dengan tahun 2021 terealisasi Rp905.584.548.068,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp334.737.793.814,00 atau sebesar 36,96%. Hal ini disebabkan karena :

- Adanya relaksasi pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan diterbitkannya beberapa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

No.	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku	Tentang	Rangkuman Isi SK
1.	973/K.533/2022	11 Agustus 2022	16 Agustus s/d 31 Oktober 2022	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dst	Membebaskan BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dst

No.	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku	Tentang	Rangkuman Isi SK
2.	973/K.78/2022	14 Februari 2022	15 Februari s/d 15 Agustus 2022	Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya	1.Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya. 2.Kerugian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 50% (lima puluh persen) dan diberikan terhadap semua jenis kendaraan bermotor. 3.Pembebasan Saksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan terhadap semua jenis kendaraan bermotor.

4.1.1.2.5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp3.400.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.804.399.816.223,43 atau 141,31%. Bila Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.618.624.833.478,17 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.185.774.982.745,26 atau sebesar 83,47%.

4.1.1.2.6. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pendapatan Pajak Air Permukaan dengan target sebesar Rp12.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.543.685.938,21 atau 79,53%. Bila Pendapatan Pajak Air Permukaan realisasi penerimaan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp10.897.465.989,40 terjadi penurunan sebesar Rp1.353.780.051,19 atau -12,42%.

4.1.1.3. *Pendapatan Retribusi Daerah*

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari 12 obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut :

4.1.1.3.1. *Retribusi Daerah*

- Retribusi Daerah kepada masyarakat atas layanan berupa:
- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
- Retribusi Sewa Rumah Dinas
- Retribusi Sewa Asrama/Mess/Kelas
- Retribusi Sewa Gedung/Aula/Ruang Serba Guna
- Retribusi Sewa Lahan/Petak
- Retribusi Pengujian Lab

Pendapatan Retribusi Daerah LRA Tahun 2022 sebesar Rp286.800.000,00 dibandingkan dari tahun 2021 sebesar Rp271.712.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.087.400,00 atau 5,55%.

4.1.1.4. *Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA*

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD Yang Sah terealisasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp31.252.992.004,72 Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp25.678.636.652,40 mengalami kenaikan sebesar Rp5.574.355.352,32 atau sebesar 21,71%.

4.1.1.4.1. Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menarik Denda Pajak kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak. Pendapatan Denda Pajak tahun 2022 terealisasi sebesar Rp31.252.992.004,72. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp25.620.639.530,40 maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.632.352.474,32 atau sebesar 21,98%. Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 5. Pendapatan Denda Pajak - LRA

No.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4
1.	Pendapatan Denda PKB Umum	29.942.599.239,00	21.450.701.770,00
2.	Pendapatan Denda BBNKB Umum	1.159.357.153,00	799.830.327,00
3.	Pendapatan Denda PBBKB	17.015.762,22	2.910.774.069,00
4.	Pendapatan Denda PAP	132.487.850,50	459.333.364,40
5.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	46.786.443,00	0,00
Jumlah		31.252.992.004,72	25.620.639.530,40

4.1.1.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas dan tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang disebut dengan Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Hibah dari penjualan kendaraan bermotor baru oleh pengusaha/dealer kendaraan bermotor pada tahun 2022 sebesar Rp14.129.080.000,00. Bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp10.907.055.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.222.025.000,00 atau sebesar 29,54%.

4.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp241.245.028.161,00 terealisasi sebesar Rp191.049.157.065,55 atau sebesar 79,19%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5*100)
Belanja	241.245.028.161,00	191.049.157.065,55	79,19	182.064.333.827,19	4,93
<i>Belanja Operasi</i>	223.574.712.821,00	175.908.980.907,16	78,68	154.031.660.210,78	14,20
Belanja Pegawai	151.538.597.003,00	117.931.017.572,16	77,82	112.805.910.148,55	4,54
Belanja Barang dan Jasa	72.036.115.818,00	57.977.963.335,00	80,48	41.225.750.062,23	40,64
<i>Belanja Modal</i>	17.670.315.340,00	15.140.176.158,39	85,68	28.032.673.616,41	-45,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.220.518.700,00	11.661.797.181,00	95,43	17.083.349.494,00	-31,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.113.102.640,00	2.147.178.977,39	52,20	10.949.324.122,41	-80,39
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	467.178.000,00	462.800.000,00	99,06	0,00	~
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	869.516.000,00	868.400.000,00	99,87	0,00	~

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja. Dari target sebesar Rp223.574.712.821,00 terealisasi sebesar Rp175.908.980.907,16 atau 78,68%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik / Turun	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5)*100
<i>Belanja Operasi</i>	223.574.712.821,00	175.908.980.907,16	78,68	154.031.660.210,78	14,20
Belanja Pegawai	151.538.597.003,00	117.931.017.572,16	77,82	112.805.910.148,55	4,54
Belanja Barang dan Jasa	72.036.115.818,00	57.977.963.335,00	80,48	41.225.750.062,23	40,64

▪ Belanja Pegawai

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp151.538.597.003,00 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp117.931.017.572,16 atau sebesar 77,82% dari target anggaran.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5)x100
<i>Belanja Pegawai</i>	151.538.597.003,00	117.931.017.572,16	77,82	112.805.910.148,55	4,54
Belanja Gaji dan Tunjangan	21.478.731.348,00	17.516.108.165,00	81,55	13.539.309.703,00	29,37
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	17.727.500.000,00	1.948.680.000,00	10,99	1.662.831.000,00	17,19
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	111.138.785.655,00	97.309.349.407,16	87,56	96.494.409.445,55	0,84
Belanja Honorarium	1.116.900.000,00	1.080.200.000,00	96,71	1.016.440.000,00	6,27

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5)x100
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	76.680.000,00	76.680.000,00	100	92.920.000,00	-17,48

- Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) belanja perjalanan sebesar Rp72.036.115.818,00 dengan realisasi sebesar Rp57.977.963.335,00 atau sebesar 80,48% dari target anggaran.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5)x100
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	72.036.115.818,00	57.977.963.335,00	80,48	41.225.750.062,23	40,64
Belanja Barang Pakai Habis	13.718.329.979,40	8.047.211.079,50	58,66	7.682.548.052,00	4,75
Belanja Jasa Kantor	27.922.654.313,60	23.730.310.043,50	84,99	17.031.178.612,00	39,33
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.121.354.888,00	1.003.281.464,00	89,47	1.000.213.330,00	0,31
Belanja Sewa Tanah	-	-	-	75.114.000,00	-100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	72.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.568.730.000,00	2.649.951.270,00	74,25	628.830.000,00	321,41
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	444.000.000,00	248.151.300,00	55,89	0,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	541.000.000,00	173.600.000,00	32,09	6.000.000,00	2,793
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.015.454.000,00	1.793.383.992,00	88,98	1.476.337.425,00	21,48

Uraian	31 Desember 2022		(%)	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	$4=(3/2)*100$	5	$6=((3-5)/5)*100$
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.472.240.600,00	2.364.641.470,00	95,65	4.095.750.725,23	-42,27
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.095.130.000,00	13.125.195.082,00	93,12	9.229.777.918,00	42,00

4.1.2.2. Belanja Modal

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp17.670.315.340,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp15.140.176.158,39 atau sebesar 85,68%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp28.032.673.616,41 maka terdapat penurunan sebesar Rp12.892.497.458,02 atau sebesar -45,99%.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		(%)	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	$4=(3/2)*100$	5	$6=((3-5)/5)*100$
Belanja Modal	17.670.315.340,00	15.140.176.158,39	85,68	28.032.673.616,41	-45,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.220.518.700,00	11.661.797.181,00	95,43	17.083.349.494,00	-31,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.113.102.640,00	2.147.178.977,39	52,20	10.949.324.122,41	-80,39
Belanja Modal Jalan,dan Irigasi	467.178.000,00	462.800.000,00	99,06	0,00	~
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	869.516.000,00	868.400.000,00	99,87	0,00	~

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.15.140.176.158,39 dipergunakan untuk menambah asset berupa :

- Peralatan dan mesin seperti kendaraan khusus Samsat,Perlengkapan Meubel,Pengadaan Mesin Fotocopy Elektronik, CCTV,AC meja dan kursi kerja, kamera digital, video conference, PC, Laptop, Thin Client dan Printer Dot Matrik.
- Bangunan dan Gedung seperti pembangunan Samsat Drive Thru, Jasa Konsultan Gedung Samsat Sangatta.Jasa Konsultan Samsat Teluk Dalam,

Ruang Cek Fisik TNKB Samsat Balikpapan, Ruang Petugas Samsat MT Haryono, Ruang Cek Fisik Long Ikis, Ruang Drive Thru Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu, dan Pengadaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

4.1.3. Pendapatan - LO

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp7.374.528.044.401,19 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2021 sebesar Rp4.774.283.779.821,64 maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.600.244.264.579,55 atau sebesar 54,46%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Des 2022	Realisasi 31 Des 2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4
PENDAPATAN - LO	7.374.528.044.401,19	4.774.283.779.821,64	54,46
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</u>	7.360.398.964.401,19	4.762.242.055.968,64	54,56
Pendapatan Pajak Daerah – LO	7.316.249.466.232,64	4.738.528.631.420,57	54,40
Pendapatan Retribusi Daerah	342.283.333,33	296.179.2666,67	15,57
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah -LO	43.807.214.835,22	23.417.245.281,40	87,07
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14.129.080.000,00	12.041.723.853,00	17,33
Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00

5.1.3.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memperoleh Pendapatan Pajak Daerah–LO sebesar Rp7.316.249.466.232,64 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.738.528.631.420,57 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp2.577.720.834.812,07 atau 54,40%.

5.1.3.2. *Pendapatan Retribusi Daerah - LO*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah-LO dari Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp342.283.333,33. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2021 yaitu sebesar Rp296.179.266,67 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp46.104.066,66 atau 15,57%.

5.1.3.3. *Lain - Lain PAD Yang Sah - LO*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah - LO. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pada tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp43.807.214.835,22 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp23.417.245.281,40 maka terjadi kenaikan sebesar Rp20.389.969.553,82 atau 87,07%.

5.1.3.4. *Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO*

Bila Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2022 sebesar Rp14.129.080.000,00 yang merupakan koreksi kurang saji aset tetap tanah karena hibah dari Pemkab Kutim sesuai NPHP Nomor : 032/0416/BPKAD.08/VI/2021 dan 032/1949/0634-VI/2021 serta Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp12.041.723.853,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.087.356.147,00 atau sebesar 17,33%.

4.1.4. *Beban - LO*

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2022 sebesar Rp173.633.662.401,47. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2021 yaitu sebesar Rp196.795.259.988,74 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp23.161.597.587,27 atau -11,77%. Rincian Beban LO tahun 2022 komparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel 12. Beban LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	$4 = \frac{(2-3)}{3} \times 100$
Beban	173.633.662.401,47	196.795.259.988,74	-11,77
- Beban Pegawai	118.145.937.572,16	112.805.910.148,55	4,73
- Beban Persediaan	7.834.340.983,26	7.305.397.815,67	7,24
- Beban Jasa	31.761.826.164,50	18.858.982.865,00	68,42
- Beban Pemeliharaan	4.524.179.096,00	5.572.088.150,23	-18,81
- Beban Perjalanan Dinas	13.125.195.082,00	9.229.777.918,00	42,20
- Beban Penyisihan Piutang	-1.955.917.551,45	35.601.055.235,29	-105,49
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	198.101.055,00	7.422.047.856,00	-97,33

5.1.4.1.1. *Beban Pegawai*

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp118.145.937.572,16 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp112.805.910.148,55 maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.340.027.423,61 atau sebesar 4,73%.

5.1.4.1.2. *Beban Persediaan*

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp7.834.340.983,26 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp7.305.397.815,67 maka terjadi kenaikan sebesar Rp528.943.167,59 atau sebesar 7,24%.

5.1.4.1.3. *Beban Jasa*

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Diklat tahun 2022 sebesar Rp31.761.826.164,50 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp18.858.982.865,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp12.902.843.299,50 atau sebesar 68,42%.

5.1.4.1.4. *Beban Pemeliharaan*

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp4.524.179.096,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp5.572.088.150,23 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.047.909.054,23 atau sebesar -18,81%.

5.1.4.1.5. *Beban Perjalanan Dinas*

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau non pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya di luar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp13.125.195.082,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp9.229.777.918,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.895.417.164,00 atau sebesar 42,20%.

5.1.4.1.6. *Beban Penyusutan dan Amortisasi*

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan Aset Tetap tahun Rp8.993.252.328,00 dan beban amortisasi (ATB) tahun 2022 sebesar Rp198.101.055,00 bila dibandingkan total Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan tahun 2021 sebesar Rp7.422.047.856,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.769.305.527,00 atau sebesar 23,84%.

5.1.4.1.7. *Beban Penyisihan Piutang*

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2022 sebesar Rp1.955.917.551,45 dibandingkan dengan

tahun 2021 sebesar Rp35.601.055.235,29 maka terjadi penurunan sebesar Rp37.556.972.786,74 atau 105,49%.

4.1.5. Aset

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp271.157.997.183,47 pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan aset tahun 2021 yaitu sebesar Rp251.253.346.059,89 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp19.904.651.123,58 atau 7,92%. Rincian pendapatan aset tahun 2022 beserta komparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel 13. Perbandingan Aset Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	$4 = \frac{(2-3)}{3} \times 100$
Aset	271.157.997.183,47	251.253.346.059,89	7,92
Aset Lancar	28.573.971.945,00	20.016.847.927,31	42,75
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0
- Piutang Pajak Daerah	259.380.043.487,00	270.207.971.301,00	-4,01
- Piutang Retribusi	4.100.000,00	98.287.000,00	-95,8
- Penyisihan Piutang	(249.246.087.527,55)	(252.209.501.885,00)	-1,17
- Beban dibayar dimuka	80.965.500,00	28.050.000,00	188,65
- Persediaan	1.989.054.607,55	1.892.041.511,31	5,13
Aset Non lancar	242.584.025.238,47	231.236.498.132,58	4,90
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0
- Aset Tetap	231.714.107.629,81	217.936.157.721,42	6,3
- Aset Lainnya	10.869.917.608,66	13.300.340.411,16	-18,27

4.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar

Rp28.573.971.945,00 Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun 2021 yaitu sebesar Rp20.016.847.927,31 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp8.557.124.017,69 atau 42,75%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan di bawah ini.

4.1.5.1.1. *Kas di Bendahara Penerimaan*

Pada akhir tahun 2022 tidak terdapat sisa uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2021 yang lalu.

4.1.5.1.2. *Kas di Bendahara Pengeluaran*

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2022, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tanggal 29 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 Dan Awal Tahun Anggaran 2023 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, Bendahara Keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 29 Desember 2022.

4.1.5.1.3. *Piutang Pajak*

Piutang pajak merupakan tunggakan pungutan pajak yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang pajak Per 31 Desember 2022 sebesar Rp259.380.043.487,00 bila dibandingkan dengan piutang pajak tahun 2021 yaitu sebesar Rp270.207.971.301,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp10.827.927.814,00 atau 4,17%. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Piutang PKB
Saldo piutang PKB Umum di tahun 2022 Rp227.127.276.279,00 bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp234.145.471.302,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.018.195.023,00 dikarenakan adanya pembayaran dan penghapusan piutang sehingga mengurangi piutang tahun 2021.
- b. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Saldo piutang BBNKB di tahun 2022 Rp24.808.073.759,00 bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp25.095.406.759,00 mengalami penurunan sebesar Rp287.333.000,00 dikarenakan adanya pembayaran dan penghapusan piutang sehingga mengurangi piutang tahun 2021.
- c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Saldo piutang PBBKB di tahun 2022 Rp6.570.159.062,00 bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp10.600.159.062,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.030.000,00 dikarenakan adanya pembayaran dan penghapusan piutang sehingga mengurangi piutang tahun 2021.
- e. Piutang Pajak Air Permukaan
Saldo awal Saldo piutang Pajak Air Permukaan di tahun 2022 Rp874.534.387,00 bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp366.934.178,00 mengalami penurunan sebesar Rp507.600.209,00 dikarenakan adanya pembayaran sehingga mengurangi piutang tahun 2021.

4.1.5.1.4. *Piutang Retribusi*

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang retribusi di Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.100.000,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun 2021 yaitu sebesar Rp98.287.000,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp94.187.000,00 atau 95,83%. Piutang Retribusi yang tercatat/tersaji pada Neraca Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.100.000,00 yang

seharusnya sebesar Rp5.100.000,00 sehingga terdapat selisih lebih saji sebesar Rp1.000.000,00. Dikarenakan adanya pembayaran sewa rumah dinas periode bulan nopember dan desember tahun 2022 atas nama Rinaldi,SE,MM sebesar Rp300.00,00 dan pembayaran atas nama Hj.Noor Aida S,Sos sebesar Rp700.000,00.

4.1.5.1.5. *Penyisihan Piutang*

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2022 sebesar Rp249.246.087.527,55 yang merupakan angka penyisihan piutang pajak tahun 2022 bila dibandingkan dengan penyisihan piutang tahun 2021 yaitu sebesar Rp252.209.501.885,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp2.963.414.357,45 atau 1,17%. Penjelasan Penyisihan piutang tahun 2022 berkurang dikarenakan adanya penurunan saldo piutang akhir tahun 2022 karena terdapat pembayaran piutang PKB Umum, PKB Alber,PAP dan PBBKB dan Penghapusan Piutang Pajak Alat Berat.

4.1.5.1.6. *Persediaan*

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.989.054.607,55 bila dibandingkan dengan persediaan tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.892.041.511,31 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp97.013.096,24 atau 5,12%. Adapun rincian Persediaan per 31 Desember 2022, sebagai berikut :

Tabel 14. Persediaan TA 2022

No	Uraian	Debet
1	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.362.000,00
2	Suku Cadang Alat Angkutan	16.069.910,00
3	Alat Tulis Kantor	173.647.515,64
4	Kertas dan Cover	45.088.395,00
5	Bahan Cetak	1.145.377.690,17
6	Benda Pos	10.000.000,00
7	Bahan Komputer	470.389.719,96
8	Perabot Kantor	21.421.986,08
9	Alat Listrik	43.653.729,00
10	Suvenir/Cendera Mata	10.178.571,70
11	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.865.090,00
Jumlah		1.989.054.607,55

4.1.5.1.7. Beban Dibayar Dimuka

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membayar beberapa jasa atau fasilitas yang masa manfaatnya sampai dengan tahun 2022. Manfaat yang masih tersisa untuk tahun mendatang tersebut sebesar Rp80.965.500,00 bila dibandingkan dengan beban dibayar dimuka tahun 2021 yaitu sebesar Rp28.050.000,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp52.915.500,00 atau 1,88%.

Tabel 15. Beban Dibayar Dimuka TA 2022

No	SKPD/UPTD	URAIAN	NO.TGL SP2D	NOMOR TANGGAL KONTRAK	BIAYA SEWA (Rp)	PERIODE TANGGAL SEWA		JUMLAH SISA BULAN SEWA	BEBAN SEWA DI TAHUN 2022 (Rp)	BEBAN SEWA DIBAYAR DI MUKA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6/7)*(7-9)	11
1	UPTD PPRD Samarinda	Penyewaan lahan dan Bangunan Ruang ATM		593.11/826/UPT D/Penda-I/X/2020	45.000.000,00	36	01/10/2020 s/d 30/09/2023	6	33.750.000,00	11.250.000,00
2	UPTD PPRD Balikpapan	Sewa menyewa lahan untuk ATM		593.1/883/PEN DA-I/XI/2022	45.000.000,00	24	01/12/2022 s/d 30/11/2023	-		
3										
4	UPTD PPRD Bontsng	Penyewaan lahan dan Bangunan Ruang ATM		593.11/188/PEN DA-I/BTG/VI/2021	45.000.000,00	36	14/06/2021 S/D 14/06/2024	15	15.000.000,00	

4.1.5.1.2. Aset Non Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp242.584.025.238,47 terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp231.714.107.629,81 dan Aset lainnya sebesar Rp10.869.917.608,66. Sedangkan aset non lancar tahun 2021 yaitu sebesar Rp231.236.498.132,58 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp11.347.527.105,89 atau 4,91%. Perubahan nilai aset non lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

4.1.5.1.3. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat /pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp231.714.107.629,81 Bila dibandingkan aset tetap tahun 2021 yaitu sebesar Rp217.936.157.721,42 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp13.777.949.908,39 atau 63,22%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek dijabarkan di bawah ini.

Tabel 16. Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap 2022 – 2021

Uraian	2021	Bertambah	Berkurang	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6=(3/2)*100
ASET TETAP	217.936.157.721,42	13.777.949.908,39	0,00	231.714.107.629,81	6,32
Tanah	47.546.989.133,91	0,00	0,00	47.546.989.133,91	0
Peralatan dan Mesin	106.144.360.868,00	11.410.828.931,00	0,00	117.555.189.799,00	10,75
Gedung dan Bangunan	186.017.918.124,52	5.649.498.072,29	0,00	191.667.416.196,81	3,04
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.462.024.875,00	0,00	0,00	2.462.024.875,00	0
Aset Tetap Lainnya	451.427.328,00	0,00	0,00	451.427.328,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.921.402.494,99	3.282.377.094,09	0,00	639.025.400,09	-83,70
Akumulasi Penyusutan	128.607.965.103,00	0,00	0,00	128.607.965.103,00	0

4.1.5.1.3. Tanah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tanah tahun 2022 sebesar Rp.47.546.989.133,91 Bila dibandingkan dengan aset tanah

tahun 2021 sebesar 47.546.898.133,91 maka dapat diketahui tidak terdapat penambahan aset.

4.1.5.1.4. *Peralatan dan Mesin*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp117.555.189.799,00. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun 2021 yaitu sebesar Rp106.144.360.868,00 maka dapat diketahui terdapat penambahan sebesar Rp11.410.828.931,00 atau 10,75%.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk Batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp1.500.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

4.1.5.1.5. *Gedung dan Bangunan*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 memiliki Gedung dan bangunan sebesar Rp191.667.416.196,81. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp186.017.918.124,52 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp5.649.498.072,29 atau 3,04%.

Adanya Jaminan Pemeliharaan/Retensi 5% terhadap dua paket pekerjaan dengan dua jaminan pada 31 Desember 2022 masih dalam masa pemeliharaan dengan jumlah nilai sebesar Rp63.960.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 17. Jaminan Pemeliharaan /Retensi Pekerjaan

No	Nomor Jaminan	Penjamin	Terjamin	Penerima Jaminan	Pekerjaan	Nilai Jaminan (Rp)	Masa Berlaku
1	616/BG-PEM/BPD-KCU/2022	PT.BPD Kaltim Penajam	CV. Altomindo Haru Karya	Bapenda Prov.Kaltim	Pembangunan Gedung Samsat Sangatta/UPTD Kutai Timur	63.960.000,00	180(Seratus Delapan Puluh) hari kalender 26 Desember 2022 s/d 23 Juni 2023
JUMLAH						63.960.000,00	

4.1.5.1.6. *Jalan,Irigasi dan Jaringan*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.462.024.875,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan aset dibandingkan dengan tahun lalu.

4.1.5.1.7. *Aset Tetap Lainnya*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp451.427.328,00 tidak ada perubahan nilai aset dari tahun sebelumnya.

4.1.5.1.8. *Konstruksi Dalam Pengerjaan*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 sebesar Rp639.025.400,09 bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu Rp3.921.402.494,99 terdapat penurunan sebesar Rp3.282.377.094,90 atau - 83,70% maka dapat diketahui adanya perubahan dari nilai aset dari tahun sebelumnya.

4.1.5.1.9. *Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomis aset tetap yang dimiliki. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian Aset Tetap. Akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar Rp137.208.959.566,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp8.600.994.463,00 atau 6,69% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp128.607.965.103,00. Hal ini terjadi karena penyusutan atas Aset Tetap yang diisusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.

4.1.5.1.10. *Aset Lainnya*

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Lainnya sebesar Rp10.869.917.608,66, bila dibandingkan dengan Aset Lainnya tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.300.340.411,16, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp2.430.422.802,5 atau 18,27%. Perubahan nilai Aset Lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek dijabarkan di bawah ini.

4.1.5.1.10.1. *Tagihan Penjualan Angsuran*

Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penjualan tunai atau dengan metode cicilan/angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara cicilan/angsuran lebih dari 12 bulan maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset non lancar. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian Lancar TPA.

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Tagihan Jangka Penjualan Angsuran Rp4.683.154.907,00. Bila dibandingkan dengan angka tahun lalu yaitu sebesar Rp8.494.827.955,50, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp3.811.673.047,50 atau 44,87%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya realisasi penerimaan angsuran/cicilan penjualan aset berupa rumah jabatan/rumah dinas.

4.1.5.1.10.2. *Aset Tidak Berwujud*

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan

software aplikasi untuk menunjang kegiatan. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp9.372.109.930,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp7.792.758.630,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.579.351.300,00 atau 20,27%. Nilai Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2022 sebesar Rp1.839.803.201,67 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 18. Aset Tidak Berwujud dan Perhitungan Amortarisasi Tahun 2022

No	URAIAN	TGL PEROLEHAN /PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN Rp.	AKUMULASI AMORTARISASI 31/12/2021	BEBAN AMORTARISASI 1 JAN s/d 31 DES 2022	AKUMULASI AMORTARISASI s/d 2022	NILAI ATB 31 DES 2022
1	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	31-Dec-11	145.500.000,00	145.000.000,00	-	145.500.000,00	-
2	Pengadaan Software Sistem Antrian Samsat	20-Dec-11	20.625.000,00	20.625.000,00	-	20.625.000,00	-
3	Software Aplikasi SP2D	31-Dec-12	29.800.000,00	29.800.000,00	-	29.800.000,00	-
4	Aplikasi dan Sistem Komputerisasi Pendapatan Daerah (Aplikasi SPPD-Aplikasi Database/OS Software/Antivirus)	31-Dec-12	64.700.000,00	64.700.000,00	-	64.700.000,00	-
5	Aplikasi Penyusunan Info Pajak Melalui SMS	24-Oct-13	49.124.000,00	49.124.000,00	-	49.124.000,00	-
6	Aplikasi Inventaris dan Controlling Barang	13-Nov-13	67.975.000,00	67.975.000,00	-	67.975.000,00	-
7	Website Dispenda Provinsi	2-Oct-13	149.000.000,00	149.000.000,00	-	149.000.000,00	-
8	Sistem Info Alat Berat dan Sisfo Tunggakan Pajak dan SKPD Jabatan	4-Aug-14	240.000.000,00	240.000.000,00	-	240.000.000,00	-
9	Software Aplikasi SP2D	21-Mar-14	24.200.000,00	24.200.000,00	-	24.200.000,00	-
10	Software Aplikasi Antrian SQ.1.0	29-Sep-14	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
11	Software Aplikasi Antrian SQ.1.0 (Review Inspektorat)	4-Apr-17	10.040.800,00	9.538.760,00	502.040,00	10.040.800,00	-

No	URAIAN	TGL PEROLEHAN /PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN Rp.	AKUMULASI AMORTARISASI 31/12/2021	BEBAN AMORTARISASI 1 JAN s/d 31 DES 2022	AKUMULASI AMORTARISASI s/d 2022	NILAI ATB 31 DES 2022
12	Sistem Informasi Pendapatan (Review Inspektorat)	5-May-17	24.640.000,00	22.997.333,33	1.642.666,67	24.640.000,00	-
13	Software Aplikasi Antrian SQ.1.0 (Review Inspektorat)	22-Aug-17	44.440.000,00	39.255.333,33	5.184.666,67	44.400.000,00	-
14	Aplikasi Pengembangan Basis IT	15-May-18	119.350.000,00	87.523.333,33	28.870.000,00	111.393.333,33	7.956.666,67
15	Aplikasi Perencanaan Penganggaran	3-Dec-18	46.145.000,00	28.456.083,33	9.229.000,00	37.685.083,33	8.459.916,67
16	Pengembangan Aplikasi Kartu Kendali SPJ	28-Feb-19	50.770.000,00	29.615.833,33	10.154.000,00	39.769.833,33	11.000.166,67
17	Aplikasi Pengembangan Sistem Samsat Online	3-Sep-19	75.895.000,00	35.417.666,67	15.179.000,00	50.596.666,67	25.298.333,33
18	Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Web	3-Oct-19	100.700.000,00	45.315.000,00	20.140.000,00	65.455.000,00	35.245.000,00
19	Aplikasi Pembuatan Sistem Informasi Pemungutan Retribusi Daerah	21-Nov-19	100.920.000,00	43.732.000,00	20.184.000,00	63.916.000,00	37.004.000,00
20	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran	6-Dec-19	81.350.000,00	33.895.833,33	16.270.000,00	50.165.833,33	31.184.166,67
21	Aplikasi Pelaporan WAPU PBBKB (APBD-P) dan Aplikasi SMS Broadcasting (APBD-P)	8-Dec-20	80.200.000,00	17.376.666,67	16.040.000,00	33.416.666,67	46.782.333,33
22	Penambahan modul aplikasi terkait pembebasan Pajak Progressive II dan seterusnya (APBD P)	20-Nov-20	50.280.000,00	11.732.000,00	10.056.000,00	21.788.000,00	28.492.000,00

No	URAIAN	TGL PEROLEHAN /PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN Rp.	AKUMULASI AMORTARISASI 31/12/2021	BEBAN AMORTARISASI 1 JAN s/d 31 DES 2022	AKUMULASI AMORTARISASI s/d 2022	NILAI ATB 31 DES 2022
23	Penambahan modul aplikasi Samsat Online terkait Relaksasi PKB 10 s/d 30% (APBD P) Serta Penambahan modul aplikasi terkait Relaksasi BBNKB II 40% (APBD P)	8-Dec-20	100.440.000,00	21.762.000,00	20.088.000,00	41.850.000,00	58.590.000,00
24	Aplikasi E-Pajak Air Permukaan	30-Nov-22	97.174.800,00	-	3.239.160,00	3.239.160,00	93.935.640,00
25	Aplikasi Sistem Informasi PBBKB	30-Nov-22	97.174.800,00	-	3.239.160,00	3.239.160,00	93.935.640,00
26	Aplikasi Web Bapenda Prov. Kaltim	12-Des-22	53.801.700,00	-	896.695,00	896.695,00	52.905.005,00
27	Sistem Integrasi & Konfigurasi Beck Office/ELTE	26-Des-22	462.800.000,00	-	7.713.333,33	7.713.333,33	455.086.666,67
28	Software VMS Base Module	26-Des-22	691.000.000,00	-	11.516.666,67	11.516.666,67	679.483.333,33
29	Lisensi Aktivasi Kamera & Jalur Jalan	26-Des-22	177.400.000,00	-	2.956.666,67	2.956.666,67	174.443.333,33
Jumlah			3.265.446.100,00	1.227.541.843,33	198.101.055,00	1.425.642.898,33	1.839.803.201,67

4.1.5.1.10.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan ke dalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini adalah Aset Rusak Berat. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp4.346.959.500,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 tidak terdapat perubahan pada nilai aset lain-lain.

4.1.6. Kewajiban

Kewajiban merupakan Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi per 31

Desember 2022 sebesar Rp332.051.164,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun 2021 yaitu sebesar Rp296.460.610,33 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp35.590.553,67 atau 12,01%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.6.1. *Pendapatan Diterima Dimuka*

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2022 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp91.250.000,00 Bila dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 yaitu sebesar Rp149.833.333,33. maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp58,583.333,33 atau 39,10%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perjanjian sewa yang telah berlangsung sejak tahun 2022 dengan pihak kedua. Adapun rincian Pendapatan diterima dimuka TA 2022 sebagai berikut :

Tabel 19. Pendapatan Diterima Dimuka TA 2022

No	No.Perjanjian Sewa	Pihak Kedua	Lokasi	Luas M2	Waktu Sewa (Bulan)	Terhitung	Berakhir	Nilai Sewa Rp.	Sisa Waktu Sewa (Bln)	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	No.593/K.59/Penda-IVII/2020 dan No. 1667/PKS/BPD-KCU/IX/2020	PT.Bank Kaltimara Kantor Cabang Utama Samarinda	Jl.Mayjen M.T. Haryono Samarinda	4	36	1/7/2020	30/6/2023	45.000.000,00	18	22.500.000,00
2	No.593.1/1100.1/Penda-I/VII/2020	PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Samarinda	Jl.Mayjen M.T. Haryono Samarinda	6	36	6/7/2020	5/7/2023	45.000.000,00	18	22.500.000,00
3	No.593.11/826/UPTD PPRD/Penda-I/X/2020 dan No.1668/PKS/BPD-KCU/X/2020	PT. Bank Kaltimara Kantor Cabang Samarinda	Jl. K.H. Wahid Hasyim Samarinda	4	36	1/10/2020	30/9/20223	45.000.000,00	21	26.250.000,00

No	No.Perjanjian Sewa	Pihak Kedua	Lokasi	Luas M2	Waktu Sewa (Bulan)	Terhitung	Berakhir	Nilai Sewa Rp.	Sisa Waktu Sewa (Bln)	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
4	No.023/PRJ/BPD- BPP/XI/2020 dan No.593.1/611/Penda-I/XI/2020	PT.Bank Kaltimara Kantor Cabang	Jl.Jend.Sudirman No.231 Balikpapan (Samast Markoni)	7,5	12	1/12/2021	30/11/2022	38.000.000,00	11	-
5	No.593.1/629/UPTD- BPP/IX/2021	PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Balikpapan	Jl.Mulawarman No.1A Balikpapan (Samsat Batakan)	3,6	24	1/10/2021	30/09/2023	40.000.000,00	21	20.000.000,00
6	No.032/01/017/Penda- I/Tgr/I/2021 dan No.001/PRJ/BPD-TGR/I/2021	PT.Bank Kaltimara Kantor Cabang Tenggarong	Jl.Wolter Monginsidi KM 6 Tenggarong	10,35	12	2/2/2021	2/2/2021	15.000.000,00	1	-
7	No.593.11/188/Penda- I/BTG/VI/2021	PT.Bank Kaltimara Kantor Cabang Bontang	Jl.M.H.Thamrin No.05 Bontang	2,64	12	14/6/2021	14/06/2021	15.000.000,00	5	-
8	974.2/043/Penda- I/2021	PT.Bank Kaltimara Kantor Cabang Sendawar	Jl. Paulus Doy Lambeng,Kutai Barat	11	12	2/2/2021	2/2/2022	15.000.000,00	1	-
JUMLAH								258.000.000,00		91.250.000,00

4.1.6.2. Utang Belanja

Utang belanja merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2022 terdapat utang beban sebesar Rp240.801.164,00 Bila dibandingkan dengan utang beban tahun 2021 yaitu sebesar Rp146.627.277,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp94.173.887,00 atau 64,23%.

Tabel 20. Rekapitulasi Utang Belanja TA 2022

NO	Instansi	Beban Listrik Rp	Beban Air Rp	Beban Telepon Rp	Beban Tambahan Penghasilan PNS Rp	Beban Jasa Pelayanan Umum Rp	Jumlah Utang Beban Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bapenda Prov.Kaltim	-	1.381.920,00	1.541.132,00	214.920.000,00	-	217.843.052,00
2	UPTD Samarinda	-	-	-	-	-	-
3	UPTD Balikpapan	-	1.298.862,00	-	-	-	1.298.862,00
4	UPTD Kutai Kartanegara	-	-	-	-	3.465.000,00	3.465.000,00
5	UPTD Kutai Barat	9.835.665,00	-	-	-	-	9.835.665,00

NO	Instansi	Beban Listrik Rp	Beban Air Rp	Beban Telepon Rp	Beban Tambahan Penghasilan PNS Rp	Beban Jasa Pelayanan Umum Rp	Jumlah Utang Beban Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
6	UPTD Kutai Timur	-	2.333.400,00	-	-	105.000,00	2.438.400,00
7	UPTD Bontang	-	292.125,00	-	-	285.000,00	577.125,00
8	UPTD Penajam Paser Utara	-	1.350.700,00	-	-	750.000,00	2.100.700,00
9	UPTD Paser	-	1.041.260,00	-	-	420.000,00	1.461.260,00
10	UPTD Berau	-	1.706.100,00	-	-	75.000,00	1.781.100,00
Jumlah		9.835.665,00	9.404.367,00	1.541.132,00	214.920.000,00	5.120.000,00	240.801.164,00

4.1.7. *Ekuitas*

Kekayaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022 sebesar Rp262.224.951.556,47 Nilai ini secara matematis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban, Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun 2021 yaitu sebesar Rp250.956.885.449,89 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp11.268.066.106,58 atau 4,49%.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1. *Domisili dan Struktur Organisasi*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di jalan Mayjend. MT. Haryono, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD PPRD tersebut beralamat sebagai berikut :

➤ UPTD PPRD Samarinda

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kota Samarinda beralamat di jalan KH. Wahid Hasyim, Samarinda.

➤ UPTD PPRD Kutai Kartanegara

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Kutai Kartanegara beralamat di jalan Wolter Monginsidi Km 6, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

➤ UPTD PPRD Balikpapan

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kota Balikpapan beralamat di jalan Mulawarman, Batakan, Balikpapan.

➤ UPTD PPRD Bontang

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kota Bontang beralamat di jalan M.H. Thamrin, Tanjung Limau, Bontang.

➤ UPTD PPRD Berau

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Berau beralamat di jalan DR. Murjani I No. 86, Tanjung Redeb, Berau.

➤ UPTD PPRD Kutai Timur

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Kutai Timur beralamat di jalan Bhayangkara, Sangatta, Kutai Timur.

➤ UPTD PPRD Penajam Paser Utara

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Penajam Paser Utara beralamat di jalan Propinsi Km 3, Penajam.

➤ UPTD PPRD Kutai Barat

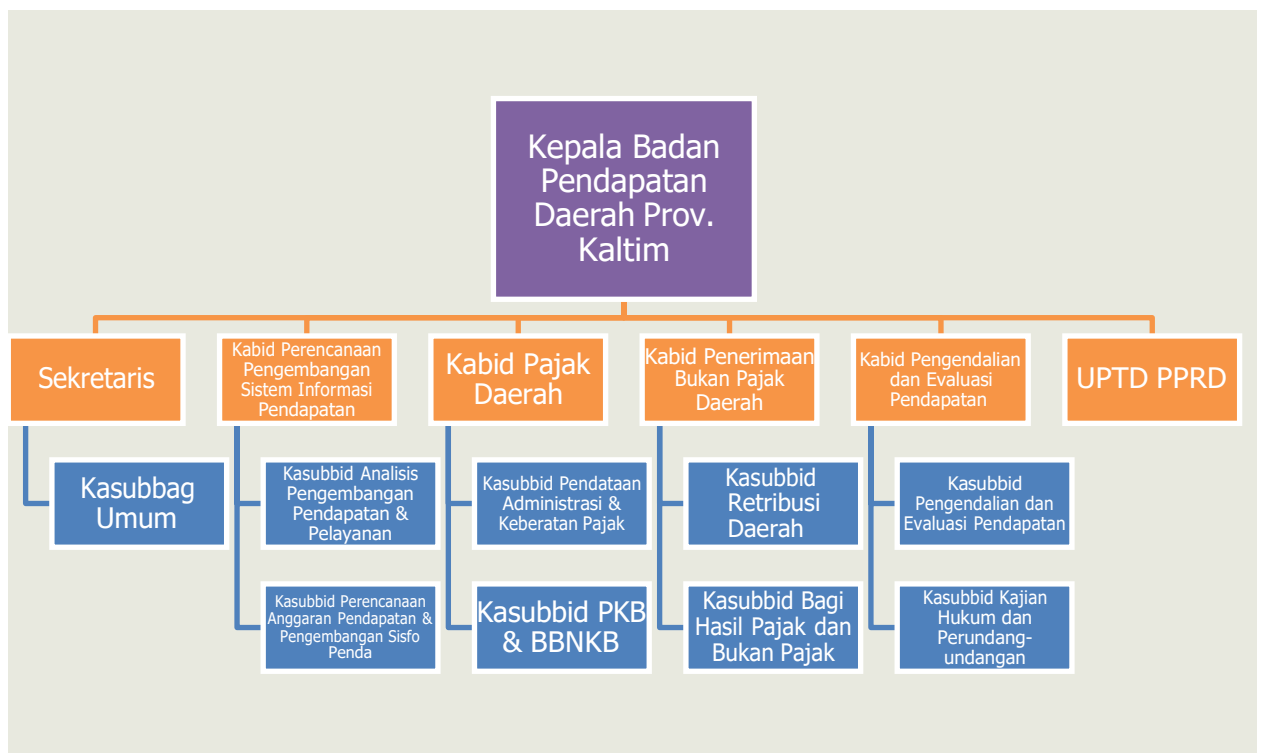
UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Kutai Barat beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.1, Melak, Kutai Barat.

➤ UPTD PPRD Paser

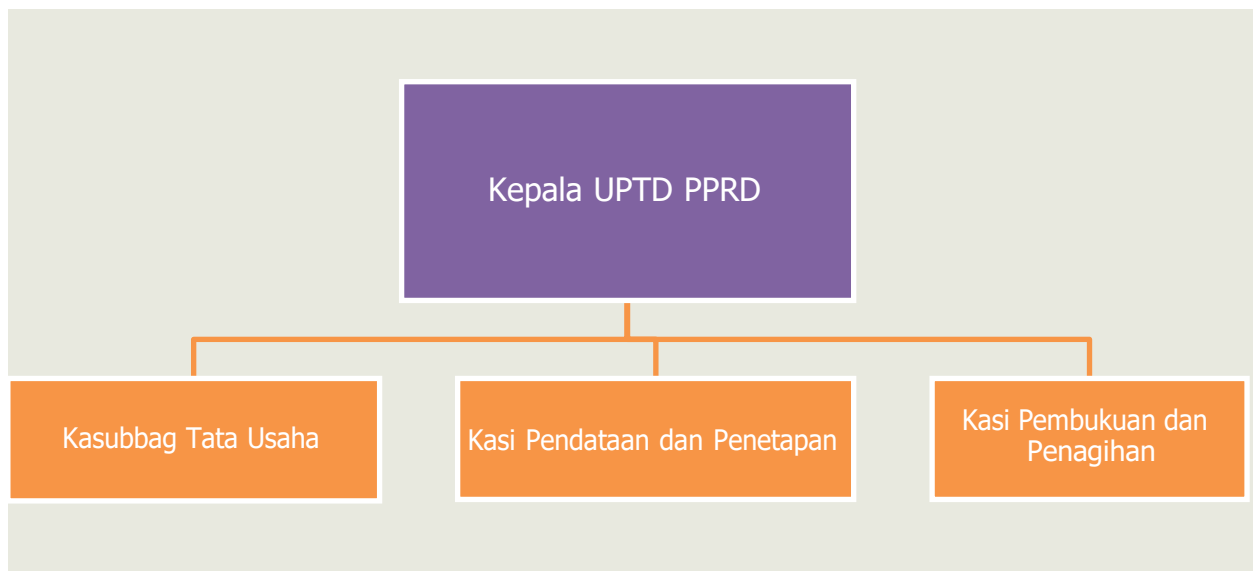
UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Paser beralamat di jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim



Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD PPRD Bapenda Prov. Kaltim



Masing – masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab tugas dan fungsi.

5.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, bidang penerimaan bukan pajak daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan. Hal ini sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim dan UPTD PPRD dijabarkan sebagai berikut :

➤ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, bidang penerimaan bukan pajak daerah, perencanaan, pembinaan

dan pengawasan pendapatan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan.
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur

Tugas dan fungsi pokok yang menjadi tanggungjawab seluruh UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas yang diberikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah
- Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT).
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.
- Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam

pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan sumber daya manusia sebanyak 591 orang, terdiri dari PNS sebanyak 309 orang dan Non PNS sebanyak 282 orang, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 21. Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2022

Jabatan	Pendidikan								
	S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SMA	SMP	SD
Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala UPTD PPRD	6	2	-	-	-	-	-	-	-
Kasi/Kasubbid	25	14	1	1	-	-	-	-	-
Staf PNS	8	37	-	124	-	-	71	6	8
Staf Non PNS	1	115	2	15	1	-	139	4	5
Jumlah	46	168	3	140	1	-	139	10	13

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan danantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 30 Juni 2023

Kepala Badan,



DRA. HJ. ISMIATI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650914 199012 2 001